



► PERSEBARAN PENYAKIT

Pemda Diminta Batasi Mobilitas Masyarakat

Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah daerah diminta untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk mengerem laju penambahan pasien positif Covid-19 di DIY. Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan untuk mengatasi jumlah pasien Covid-19 di DIY yang meningkat tajam, salah satu caranya adalah dengan menghentikan mobilisasi masyarakat terlebih dahulu.

Doni, sapaan akrab Riris Andono Ahmad, mengatakan Pemda DIY tidak perlu hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tetapi cukup kembali mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan pada bulan Maret lalu.

"Sampai akhir September ini minimal tanggap darurat masih dilakukan. Jadi sebenarnya isunya bukan pada apa yang harus diubah. Tapi kemudian apa yang harus kita implementasikan secara konsisten," ujar Doni, Selasa (22/9).

Ia menyampaikan, bahwa pemerintah sepatutnya bisa memastikan agar kebijakan untuk tetap menjaga jarak selama pandemi bisa terus berjalan. Baik kawasan wisata, rumah makan maupun kegiatan lainnya seharusnya bisa kembali pada kebijakan sebelumnya pada Maret. "Kalau mau konsisten ya seharusnya kita menerapkan apa

yang kita terapkan Maret lalu," ujarnya.

Doni menyampaikan di DIY sudah terjadi penularan komunitas secara meluas. Jika hal tersebut tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan semakin memperparah keadaan. Ia menilai, sudah saatnya penularan komunitas dihentikan segera.

Menurutnya, mungkin saja jika faktor ekonomi tetap bisa berjalan bersama tanpa harus merugikan faktor kesehatan. Hanya saja, setiap orang yang terlibat di sana perlu memahami batasan di antara keduanya. Dalam artian, pemilik usaha bisa memahami kapan harus menarik rem untuk mengendalikan bisnisnya.

Seandainya terjadi penularan dalam jumlah besar, hal tersebut dinilai akan berdampak pada sektor ekonomi juga. "Kita masih dalam situasi pandemi, walaupun kita membolehkan kegiatan ekonomi, kita perlu tahu bahwa dengan meningkatnya mobilitas risiko menular tentu akan meningkat," terang Doni.

Doni juga menerangkan bahwa dari sektor kesehatan sendiri tidak serta merta melarang adanya aktivitas ekonomi. Namun, sekali lagi ia menekankan mengenai pentingnya memperhatikan waktu kapan rem darurat harus ditarik dan bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat.

► Halaman 10

Pemda Diminta...

Terkait dengan tingginya penambahan kasus positif di DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan itu sebagai salah satu konsekuensi proses tes *polymerase chain reaction* (PCR) sesuai standar World Health Organization (WHO) yakni 1% dari populasi penduduk. Hingga saat ini, DIY total telah melakukan tes *swab* sebanyak 66.071 sampel dari 52.764 orang.

Dengan semakin banyaknya *tracing* dan *screening*, diharapkan juga mampu semakin menurunkan angka penularan. "Yang sudah [terkonfirmasi positif] *mangga* di rumah sakit, diobati, diberi vitamin dan sebagainya," kata dia.

Gugus Tugas Penanganan COvid-19 DIY mengumumkan 67 penambahan kasus positif pada Selasa. Sleman masih mendominasi penambahan ini sebanyak 33 kasus. Sementara sebanyak 35 kasus dinyatakan sembuh, yang didominasi oleh Kota Jogja sebanyak 30 kasus.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, berty Murtiningsih, menjelaskan berdasarkan riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *screening* pekerjaan

(satu kasus), *screening* pasien (satu kasus), *periksa mandiri* (sembilan kasus), *tracing* kasus positif (36 kasus), perjalanan luar daerah (delapan kasus), kontak keluarga luar wilayah (satu kasus), dan masih dalam penelusuran (11 kasus).

Sampai saat ini, jumlah karyawan Kesehatan yang terkonfirmasi positif sekitar 360 kasus. dari jumlah itu, sekitar 90% kasus tak bergejala. "Meski tak bergejala, tetap diisolasi oleh RS masing-masing dan selter di setiap kabupaten kota," ungkapnya.

Protokol Kesehatan

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan telah memanggil sebanyak 18 pelaku usaha terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada akhir pekan lalu. "15 pelaku usaha dari Kopi Jos, tiga lainnya dari pelaku usaha rumah makan di Kota Jogja," ungkapnya.

Pelaku usaha yang dipanggil tersebut diberikan pembinaan berupa arahan dan surat pernyataan untuk menegakkan protokol kesehatan. Tindak lanjutnya, pada pekan berikutnya akan dipantau lagi. Jika belum ada perubahan maka akan kembali

diberi pembinaan kembali. "Kami membuat SOP tiga kali pembinaan, dari pembinaan pertama dilihat tujuh hari kemudian, kalau belum ada perubahan pembinaan kedua, lalu tiga hari pembinaan ketiga, dan tiga hari lagi kalau belum ada perubahan penutupan sementara," ungkapnya.

Selain pelaku usaha, terdapat 789 perorangan yang terjaring dari operasi protokol Kesehatan pada Sabtu (19/9) dan 805 perorangan pada Minggu (20/9). Operasi ini dilakukan di 64 titik, di antaranya Kaliurang, sepanjang pantai, Waduk Sermo, Tugu Jogja, Malioboro, dan lainnya.

Rata-rata pelanggar protokol kesehatan merupakan kelompok masyarakat usia 20 tahun-30 tahun. Hal ini kata dia, korelatif dengan penambahan kasus positif DIY yang didominasi oleh usia produktif.

Untuk pembatasan, saat ini Pemda DIY menerapkan pembatasan pengunjung di tempat usaha atau tempat wisata maksimal 50% dari kapasitas normal. Sementara untuk pembatasan jam operasional diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota. (Suara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005